



Kebijakan Subsidi BBM

Siti Salasatu Sa'diyah¹, Eli Apud Saepudin², Resma Cahya³, Siti Lita Rosita⁴,
Nova Qurrota Ayun⁵

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa^{1,2,3,4,5}

*Email:

sitisalasatus@gmail.com¹, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id², resmacahya45@gmail.com³,
litarosita090@gmail.com⁴, waldinovalea@gmail.com⁵

Diterima: 05-06-2025 | Disetujui: 06-06-2025 | Diterbitkan: 08-06-2025

ABSTRACT

Fuel Oil (BBM) Subsidy is a government policy that aims to maintain the affordability of fuel prices for the community, especially low-income groups, while supporting the stability of the national economy. The purpose of this study is to see how the impact of the BBM subsidy policy on the country's economy, government budget and distribution of energy resources. In response to this, the government is considering various policy options such as shifting BBM subsidies to more targeted direct cash assistance (BLT), in order to increase the effectiveness of subsidy programs that support the transition to new and renewable energy (EBT) in Indonesia.

Keywords: subsidies, fuel, impact

ABSTRAK

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga keterjangkauan harga bahan bakar bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung kestabilan ekonomi nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan subsidi BBM terhadap perekonomian negara, anggaran pemerintah dan distribusi sumber daya energi. menyikapi hal ini pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan seperti pengalihan subsidi BBM ke bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran, demi meningkatkan efektivitas program subsidi yang mendukung peralihan ke energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Katakunci: Subsidi, BBM, Dampak

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Siti Salasatu Sa'diyah, Eli Apud Saepudin², Resma Cahya, Siti Lita Rosita, & Nova Qurrota Ayun. (2025). Kebijakan Subsidi BBM. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 286-293. <https://doi.org/10.63822/bbs6f165>

PENDAHULUAN

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban biaya energi bagi masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. BBM adalah kebutuhan primer yang sangat penting dalam berbagai sektor, terutama transportasi, yang menyerap sebagian besar konsumsi BBM nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi agar harga BBM tetap terjangkau dan dapat mendukung pemerataan akses ekonomi serta pembangunan social (Fitriana, 2014). Namun, dalam praktiknya, subsidi BBM seringkali tidak tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga menimbulkan beban anggaran negara yang sangat besar. Subsidi BBM yang terus meningkat menimbulkan tantangan dalam pengelolaannya, sehingga perlu adanya evaluasi dan peralihan kebijakan subsidi agar lebih efektif dan efisien, misalnya dengan mengalihkan subsidi dari BBM fosil ke bahan bakar nabati (BBN) yang lebih ramah lingkungan.

Bahan bakar minyak memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, menjadi salah satu komoditas vital yang mendukung hampir seluruh sektor ekonomi. kebutuhan BBM terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri, sektor transportasi, dan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. kondisi ini menyebabkan konsumsi BBM semakin tinggi yang berpotensi menambah beban ekonomi negara. peningkatan signifikan dalam anggaran subsidi bahan bakar minyak telah menyebabkan alokasi dana untuk pembangunan lainnya menjadi terbatas. kondisi ini menciptakan hambatan dan mendorong produktivitas dan konektivitas antar wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Menurut dari kementerian ESDM sektor transportasi menempati urutan pertama dalam penggunaan BBM dengan persentase sebesar 65% atau setara dengan 45,9 juta KL dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Karenanya, untuk menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan, pemerintah membuat kebijakan subsidi agar kelompok masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses terhadap pelayanan publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya subsidi BBM masih belum tepat pada sasaran. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat mampu yang turut menggunakan BBM subsidi. Menurut data Kementerian Keuangan, 80% Pertalite dinikmati oleh masyarakat mampu dan 89% Solar Subsidi dinikmati oleh dunia usaha dan masyarakat mampu (Rika Widianita, 2023).

Dibalik adanya pro dan kontra dalam kenaikan harga bahan bakar minyak, kita seharusnya juga sadar akan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin lama semakin menipiskan persediaan minyak bumi di dunia ini. Terdapat aturan yang mengatur mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Sehingga diperlukan kebijakan dan atau program pembangunan yang senantiasa memperhatikan konservasi terhadap lingkungan hidup untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan (Wicaksono & Najicha, 2021). Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dapat diartikan bahwa pemerintah semestinya tidak sewenang-wenang dalam menetapkan harga bahan bakar minyak dikarenakan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa apapun kebijakan yang diambil mengenai pemanfaatan kekayaan alam haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat. Kenaikan harga minyak dunia yang bergejolak serta meningkat drastis memaksa Indonesia mengeluarkan banyak anggaran sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan

anggaran pemangunan. Alasan utamanya adalah dasar dari perhitungan APBN adalah harga minyak dunia, akan tetapi posisi Indonesia sekarang ini yang bukan sebagai pemasok minyak bumi melainkan adalah sebagai pengimpor minyak bumi membuat pemenuhan anggaran pembangunan yang sangat sulit dilakukan (Zahra Silbaqolbina & Ulfatun Najicha, 2022).

Sejak pemerintah memutuskan mulai menetapkan kebijakan subsidi BBM di Indonesia mengakibatkan realisasi anggaran subsidi energi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Realisasi subsidi BBM yang melebihi anggaran yang ditetapkan merupakan penyebab tidak sehatnya keseimbangan primer dari sisi pengeluaran sehingga menimbulkan defisit anggaran. BBM bersubsidi yang berlebihan tanpa dibarengi oleh ketersediaan sumber minyak dalam negeri, menjadikan Indonesia kini menjadi negara pengimpor minyak dan sangat rentan terhadap inflasi harga minyak dunia yang diperdagangkan di pasar internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (Mulyani et al., 2015).

Pemberlakuan subsidi BBM secara konsisten mengakibatkan pemerintah harus menyediakan anggaran rutin untuk penjualan BBM di dalam negeri seperti minyak tanah, bensin, avgas, avatur, dan jenis BBM lainnya dengan harga murah. Dengan kebijakan ini, subsidi BBM dengan sendirinya berefek pada peningkatan permintaan BBM yang sekaligus meningkatkan penggunaan energi listrik di dalam negeri. Dengan konsistensi subsidi BBM ini, baik masyarakat maupun perusahaan dininabobokan oleh pembelian harga BBM yang murah di dalam negeri dengan mengabaikan faktor kelangkaan sumber-sumber alamnya. Sekali lagi, hal ini justru mendorong peningkatan konsumsi BBM dalam negeri karena masyarakat sudah terlanjur disuapi BBM domestik yang murah dan pemerintah pun tampaknya semakin tidak realistis terhadap perkembangan harga BBM internasional yang cenderung meningkat (Hasan, 2018).

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap daftar BBM jenis premium dan solar yang beredar di pasaran titik awalnya, keuangan pemerintah masih mampu membiayai subsidi tersebut titik namun, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, beban subsidi semakin berat. subsidi dan kompensasi energi pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN meningkat tiga kali lipat titik lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu seperti pemilik mobil pribadi. untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai melakukan sejumlah program yang dinilai bisa menghambat penggunaan BBM bersubsidi titik salah satunya adalah pengalihan subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran titik selain itu, pemerintah juga mengatur ulang kriteria penerima subsidi solar untuk menghambat anggaran subsidi.

Risiko dalam negeri seperti meningkatnya subsidi BBM dapat menyebabkan pelebaran defisit anggaran negara, yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional. saat ini, ekonomi Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif menuju arah yang lebih ideal, ditandai dengan perubahan struktur ekonomi ke arah yang berkelanjutan dan sehat, besarnya subsidi BBM akan selalu menjadi masalah bagi pemerintah yang akan datang. Subsidi BBM memberikan dampak yang kompleks dan beragam bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Secara fiskal, subsidi BBM menyedot anggaran negara dalam jumlah besar sehingga mempersempit ruang fiskal untuk belanja modal dan program sosial lainnya, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional (Sampe, 2023).

Selain itu, subsidi ini sering tidak tepat sasaran karena sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sementara kelompok miskin menerima bagian yang jauh lebih kecil, Dampak sosialnya juga terlihat dari potensi peningkatan kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang diikuti oleh inflasi, terutama pada harga transportasi dan

bahan pangan. Dari sisi lingkungan, subsidi BBM yang mendorong konsumsi bahan bakar fosil berkontribusi pada kerusakan lingkungan, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca yang tinggi, yang berdampak negatif pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kebijakan subsidi ini rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan, yang merugikan negara dan masyarakat luas. Dengan demikian, subsidi BBM menjadi beban yang signifikan bagi negara dan menimbulkan berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati (Soesanto et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan mencari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan artikel ini, dengan melakukan membaca dan meneliti serta berfikir kritis atas sumber sumber dari buku, jurnal, ataupun internet yang memiliki hubungan dengan artikel ini.

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, catatan sejarah, dan sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur, yang mencakup langkah-langkah sistematis seperti mengidentifikasi teori yang relevan, menelusuri literatur yang sesuai, serta menganalisis dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, biasanya berupa dokumen atau keterangan dari pihak lain. Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan mendukung interpretasi terhadap data primer. Selain itu, literatur yang membahas tentang dampak kebijakan dan tantangan-tantangan yang dihadapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian rakyat sangat dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan harga BBM. Meningkatnya biaya produksi di berbagai industri, terutama industri dan transportasi, memiliki efek negatif yang paling mencolok. Ini menyebabkan harga barang kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan pakan terus naik, menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar menurunkan kemampuan sebagian besar orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, golongan mampu lebih banyak menikmati subsidi yang seharusnya membantu orang miskin, tetapi seringkali tidak tepat sasaran (Tambunan et al., 2022).

Lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang rentan seperti mahasiswa dan masyarakat berpendapatan rendah. Biaya transportasi dan barang kebutuhan pokok meningkat karena kenaikan harga BBM, yang menyebabkan inflasi dan beban hidup meningkat. Kondisi ini juga dapat mengurangi mobilitas, terutama bagi mahasiswa yang bergantung pada transportasi umum atau mobil pribadi untuk pergi ke kampus. Sayangnya, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya diiringi dengan solusi konkret dari pemerintah, seperti bantuan langsung atau subsidi alternatif yang menysasar kelompok terdampak secara langsung. Akibatnya, kebijakan ini menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek, meskipun mungkin bermanfaat dalam jangka Panjang (Pohan & Al- Farizi, 2023).

Setelah itu, pemerintah memberikan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang memiliki dampak pada perekonomian Indonesia dalam berbagai cara. Efek langsung dari pengurangan subsidi BBM adalah penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi efek ini paling sering terjadi dalam jangka pendek. Namun, efek negatif ini dapat dikurangi dengan kebijakan kompensasi yang tepat. Misalnya, simulasi menunjukkan bahwa memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai kepada rumah tangga miskin mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan lebih baik daripada memberikan kompensasi dalam bentuk non-uang tunai, seperti investasi dalam konstruksi atau transportasi (Kurniawati, 2017).

Selain itu, jika menjadi sasaran kompensasi, sektor yang secara langsung terkait dengan konsumsi BBM, seperti angkutan darat, akan lebih terpengaruh dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sektor yang tidak langsung terkait, seperti konstruksi. Dari perspektif lingkungan, meskipun penurunan subsidi BBM berdampak pada output ekonomi dan pendapatan rumah tangga, penerapan kebijakan yang disertai dengan kompensasi yang tepat sasaran dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan bahkan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, meskipun penurunan subsidi BBM berdampak pada output ekonomi dan pendapatan rumah tangga, kebijakan penurunan subsidi BBM jenis solar terbukti lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan emisi CO₂.

Proses yang menghasilkan peningkatan pendapatan riil per kapita dan peningkatan sistem kelembagaan dalam jangka panjang disebut pembangunan ekonomi. Selama proses ini, kenaikan PDB/PNB menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang terkait erat dengan penggunaan sumber daya alam. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin banyak konsumsi sumber daya alam, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan ketersediaan sumber daya. Proses ini menghasilkan nilai tambah, seperti upah, gaji, dan balas jasa faktor produksi lainnya yang dihitung dalam PDRB. Output ini terbagi menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Najma, 2008).

Penurunan jumlah produksi minyak mentah di Indonesia, menyebabkan pemenuhan kebutuhan minyak di dalam negeri tidak terpenuhi, dan sesuai dengan hukum penawaran sebagaimana dikemukakan di atas, akan menyebabkan harga minyak meningkat. Belum optimalnya berbagai pengelolaan terhadap sumberdaya minyak di satu sisi, dan di sisi lain adanya kebutuhan minyak yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat Indonesia, menimbulkan ketidakseimbangan (disequilibrium) antara supply dan demand. Adanya ketidakseimbangan atau dalam hal ini under supply ini merupakan salah satu indikasi yang menyebabkan berfluktuasinya harga minyak ke arah peningkatan harga yang terus menerus terjadi di Indonesia, sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduknya yang semakin bertambah (Muhardi, 2005).

Sumber daya seperti bahan bakar minyak (BBM) sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Industri dan transportasi menggunakan paling banyak energi, tetapi rumah tangga, terutama di daerah perdesaan, masih bergantung pada energi non-komersial seperti kayu bakar. Oleh karena itu, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penyediaan energi yang murah dan bersih menjadi prioritas utama.

Kebijakan yang menaikkan harga BBM sangat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Kenaikan harga BBM dapat menyebabkan inflasi, yaitu peningkatan terus-menerus harga barang dan jasa, yang berdampak pada penurunan nilai uang dan kemampuan konsumsi masyarakat. Inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Callysta Qabil et al., 2022).

Kebijakan kenaikan harga BBM telah menunjukkan penurunan daya beli. Pemerintah, sebagai contoh, menaikkan harga BBM lebih dari 100% pada akhir 2005 untuk mengurangi beban subsidi. Kebijakan ini menyebabkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan Indeks Daya Beli (IDB) di Kalimantan Timur. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya karena harga barang dan jasa meningkat, sehingga kebijakan harga BBM berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan keberhutangannya.

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi keuangan negara, terutama dalam hal alokasi anggaran dan kesehatan fiskal jangka panjang. Subsidi BBM memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga alokasi anggaran negara cenderung tersedot ke sektor ini. Akibatnya, ruang fiskal untuk membiayai program-program pembangunan yang bersifat produktif, seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan yang merata, serta peningkatan kualitas pendidikan, menjadi sangat terbatas. Padahal, sektor-sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Rivani, 2014).

Lebih jauh lagi, besarnya porsi anggaran untuk subsidi BBM juga menghambat pelaksanaan program-program sosial yang lebih tepat sasaran, terutama yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketidaktepatan sasaran dari subsidi BBM yang juga dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu menjadi salah satu alasan utama pemerintah kerap mengambil langkah untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi. Dalam upaya menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah sering kali dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu mengurangi atau membatasi subsidi BBM guna menghindari pembengkakan defisit anggaran negara yang dapat berujung pada ketidakstabilan ekonomi makro (Setiyowati, 2019).

Selain itu, realisasi subsidi BBM kerap kali melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disebabkan oleh tingginya volatilitas harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang sangat mempengaruhi besarnya beban subsidi. Situasi ini memperumit pengendalian terhadap belanja negara dan memperkecil ruang gerak fiskal pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak atau krisis yang tidak terduga. Ketergantungan terhadap variabel eksternal ini menunjukkan betapa rentannya kebijakan subsidi BBM terhadap dinamika global, dan menggarisbawahi pentingnya transformasi kebijakan energi menuju sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Subsidi BBM memang berperan penting dalam menjaga kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu dan mendukung sektor ekonomi strategis, tetapi beban fiskal dan dampak negatifnya terhadap efisiensi ekonomi, lingkungan, dan ketimpangan sosial membuat kebijakan subsidi ini perlu direformasi. Pengurangan subsidi yang disertai kompensasi tepat sasaran dan pengalihan dana subsidi ke program pembangunan produktif dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan. Subsidi BBM memang memiliki manfaat dalam menjaga keterjangkauan harga bahan bakar bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, namun di sisi lain menimbulkan beban yang sangat besar terhadap anggaran negara. Besarnya alokasi dana untuk subsidi BBM seringkali mengorbankan belanja produktif di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga membatasi ruang fiskal pemerintah untuk investasi jangka panjang dan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memperparah ketimpangan sosial dan menimbulkan distorsi pasar, sedangkan pengurangan atau pembatasan subsidi walaupun berdampak positif terhadap kesehatan fiskal akan menimbulkan efek samping berupa kenaikan harga barang dan jasa serta penurunan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola kebijakan subsidi BBM secara hati-hati agar tetap mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, & Spto Hermawan. (2022). Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 469–489. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55953>
- Fitriana, R. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Hasan, J. M. (2018). Dampak Pencabutan Subsidi Bbm Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Renaissance*, 3(01), 300. <https://doi.org/10.53878/jr.v3i01.69>
- Kurniawati, L. (2017). Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia. *Info Artha*, 1(2), 91–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i2.94>
- Muhardi. (2005). Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia. *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia*, XXI(4), 454–474.
- Mulyani, P. A., Eia, A., Esdm, K., & Migas, D. (2015). Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi subsidi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia study on the factors affecting the fuel subsidy (BBM) in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 1–8.
- Najma, N. (2008). Dampak Kebijakan Hargaminyak Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Academia*, 23–32.
- Pohan, F. R., & Al-Farizi, C. W. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Sektor Transportasi. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(2), 92–100.
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rivani, E. (2014). Kebijakan Subsidi BBM Dan Efisiensi Perekonomian. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, VI(09), 13–16. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-9-I-P3DI-Mei-2014-44.pdf
- Sampe, S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 43–49. <https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49>
- Setiyowati, A. (2019). Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Nama Rakyat (Tinjauan Kritis Konsepsi Keadilan Sosial Ekonomi Ibnu Taimiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 107. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).107-119](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).107-119)
- Soesanto, E., Komansilan, T., & Salsabillah, N. (2025). *Dinamika Harga BBM : Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional dan Daya Beli Masyarakat*. 165–174.

- Tambunan, N., Aprilia, S., & Pangesti Rahayu, N. (2022). Study Literature: Dampak Kenaikan Bbm Bagi Perekonomian Rakyat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 329–336. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.550>
- Zahra Silbaqolbina, Y., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(06), 604–611. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i06.198>